

SIARAN PERS

KPU Sumsel Akan Beri Jawaban dalam Sidang PPHU Pileg

Jakarta, 7 Mei 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 pada Rabu (8/5), mulai pukul 19.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak di Ruang Siang Panel 3 di Lantai 4 Gedung I MK. Dari 16 perkara yang diregistrasi, Majelis Hakim Panel yang diketuai Hakim Konstitusi Arief Hidayat akan memeriksa 9 perkara terlebih dahulu.

Sembilan perkara tersebut, yakni 263-02-10-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Abrianto), 266-02-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Masturo), 239-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (PAN), 268-01-13-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (PBB), 243-02-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Sugondo), 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (PAN), 242-02-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Deni Hegar), 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (PDIP), dan 270-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Parisman).

Parisman, Calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dapil 7 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024 ke MK. Parisman didampingi oleh kuasa hukum Dody Satriadi. Dalam persidangan, Dody menyatakan ada dugaan penambahan suara calon nomor 1 atas nama M. Oktafiansyah di Kecamatan Pendopo pada 16 desa untuk 89 TPS yaitu sebanyak 3.021 suara. Berdasarkan sandingan dengan Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi dengan Model D hasil Kecamatan, terdapat koreksi Perolehan Suara Calon nomor urut 1 tersebut dari 6.105 suara menjadi 9.126 suara.

Beralih ke perkara lainnya, Sugondo yang merupakan calon anggota DPRD Provinsi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan 9 meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 sepanjang Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan 9. Namun, hingga persidangan pada Kamis (2/5) dibuka, kuasa hukum Pemohon, Rahmad Hartoyo menyampaikan belum mendapatkan surat rekomendasi dari Ketua Umum DPP Partai Golkar terkait gugatannya ke MK.

(TIR)